

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Sejak Indonesia merdeka pembangunan desa menjadi salah satu perhatian pemerintah. Dari masa ke masa strategi membangun desa memiliki tujuan yang berbeda, baik yang berorientasi pada pembangunan pertanian demi menjaga kestabilan pangan, pembangunan fisik, serta pemberdayaan masyarakat. Apalagi Indonesia merupakan wilayah pemerintahan dengan sistem desentralisasi, dimana pemerintah daerah dapat mengatur urusannya secara mandiri. Sehingga desa bisa menjadi salah satu alat untuk menilai bahwa keanekaragaman budaya yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan daerah.

Desa juga merupakan sebuah lembaga atau komunitas masyarakat yang memiliki kearifan lokal yang berbeda tiap tempat. Desa memiliki wewenang untuk mengatur bagaimana kemajuan pembangunan yang diinginkan nilai dari suatu desa tersebut. Hak dan kewajiban juga diberikan termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Bagaimana dana yang dimiliki oleh desa dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan baik untuk pembangunan maupun pengembangan.

Pembangunan merupakan sebuah aspek yang penting dalam kehidupan bernegara. Karena dengan melihat pembangunan yang ada, dapat menentukan kesejahteraan dari masyarakat di suatu daerah. Pembangunan merupakan

sebuah rangkaian perubahan yang dilakukan pada berbagai aspek seperti struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional (Hariyanto, Sri. 2016). Pembangunan dilakukan harus sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi yang mengalami ketimpangan dan adanya kesempatan kerja yang luas. Sistem pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, merupakan satu kesatuan mengenai cara perencanaan pembangunan yang menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang dilakukan oleh penyelenggara dan masyarakat baik tingkat pusat dan daerah.

Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan adat istiadat serta asal-usulnya yang sudah diakui oleh negara. Pembangunan desa saat ini menjadi fokus pemerintah, yaitu salah satunya dengan program desa membangun. Desa menjadi cermin bahwa pemerintahan sudah melakukan kerjanya. Sehingga dapat dilihat bahwa maju atau tidaknya sebuah desa tergantung dari pembangunan yang dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa harus diciptakan sebuah landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan. Serta masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa. Sehingga dapat menjadi sebuah strategi dalam melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kehidupan bermasyarakat.

Dalam mewujudkan peraturan Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa yang berisi aturan bagaimana mengelola serta mewartahi kepentingan serta kebutuhan masyarakat. Pentingnya pemerintah daerah untuk memberikan kewenangan kepada desa untuk menggali potensi yang dimiliki dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Nawacita disebutkan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan sesuai dalam kerangka Negara Kesatuan.

Meninjau dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya serta berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab.

Menurut Pasal 71 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Perlu adanya kebijakan bagi desa untuk mandiri dengan memberikan keleluasaan dalam mengelola keuangan dan pembangunan desa.

Akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah merupakan sebuah wujud dari kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas sangat membantu dalam mencatat dan melaporkan segala yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016, menjelaskan mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana Desa. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat memberikan transparansi dalam pengelolaan dana desa (Handayani, 2018).

Fungsi dan peran pemerintah desa sangat penting dan strategis oleh karena itu dalam memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat secara efisien dan efektif yang tentunya dalam pemerintah desa ada tanggung jawab besar yang mesti dipertanggungjawabkan untuk itu pemerintah desa itu kemudian harus menerapkan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya dalam artian setiap berakhirnya suatu kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa harus dapat menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat dalam suatu desa tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Dan semua itu tidak lepas dari pengelolaan keuangan desa yang mana pengelola harus menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Pada tahun 2013, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan survei kepada pemerintah desa baik dari desa tertinggal

hingga desa maju dan mandiri yang telah mengaplikasikan teknologi informasi dalam pengelolaan desa. Akan tetapi tidak sedikit desa yang belum memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan desa, Salah satunya yaitu pengelolaan keuangan. Rendahnya tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan desa disebutkan oleh BPKP.

Selain kendala diatas terdapat desa yang belum memiliki prosedur untuk menjamin ketertiban dalam administrasi serta pengelolaan keuangan desa. Sehingga perlu adanya sinergitas yang dilakukan oleh lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam pengendalian serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan pengembangan sebuah aplikasi tata kelola keuangan melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pada awalnya siskeudes dikembangkan oleh BPKP Sulawesi Barat yang dijadikan sebagai percontohan nasional. Kemudian setelah berhasil pada tahap pengembangan kemudian diambil alih oleh Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP.

Implementasi siskeudes juga dilakukan secara bertahap, mengingat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki tiap desa berbeda. Menurut data dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2019 implementasi siskeudes di Indonesia sudah mencapai 95,06%. Sedangkan untuk Jawa Tengah telah mencapai 95,06% dari keseluruhan desa yang ada. Siskeudes bertujuan sebagai aplikasi tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan dan akuntabel. Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam

mengelola pemerintahan desa dan sumber daya yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan serta potensi yang dimiliki oleh desa.

Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan mulai Tahun 2018. Penerapan Siskeudes ini dilaksanakan di 266 desa se Kabupaten Temanggung. Kecamatan Kranggan sendiri terdiri atas 12 desa dan Desa Sanggrahan menjadi satu-satunya desa maju di Kecamatan Kranggan dengan nilai 0,7249. Sedangkan 11 desa lainnya masuk dalam kategori berkembang.

Desa Sanggrahan juga telah mengimplementasikan siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Predikat sebagai desa maju juga dapat dilihat dari pembangunan desa yang dilakukan serta pengelolaan keuangan dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaan perencanaan keuangan kendala yang harus dihadapi adalah dengan kondisi sumber daya manusia yang perlu adanya upaya untuk diregenerasi atau pemberian sertifikasi guna menunjang pelaksanaan operasional administrasi desa.

Selain itu Desa Sanggrahan juga dijadikan desa rujukan oleh desa sekitarnya di Kecamatan Kranggan dalam pengimplementasian siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Sanggrahan sendiri merupakan desa yang sudah sangat menerapkan siskeudes yang baik, dimana setiap warganya dapat mengakses platform media massa Desa Sanggrahan dan segala informasi mengenai Desa Sanggrahan akan terlihat termasuk didalamnya

siskeudes. Akan tetapi tidak semua masyarakat bisa menggunakan teknologi dalam mengakses website. Dari segi transparansi laporan keuangan memang dinilai sudah baik.

Penerapan siskeudes di Desa Sanggrahan memberikan dampak yang terlihat. Akan Tetapi menurut pengamatan yang saya lakukan ada dampak positif maupun negatif terhadap internal desa dalam mengimplementasikan siskeudes. Sumber daya manusia (SDM) yang belum lihai dalam menggunakan siskeudes Selain itu adanya kendala server dalam sistem yang terkadang dalam melakukan input data. Meskipun siskeudes ini dinilai sangat membantu dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, perlu adanya pengendalian dalam pelaksanaannya. Berawal dari hal tersebut maka saya bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai **“EFEKTIVITAS SISKEUDES DALAM MANAJEMEN KEUANGAN DESA SANGGRAHAN KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018-2020”**.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Siskeudes dalam manajemen keuangan Desa Sanggrahan Tahun 2018-2020?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Siskeudes di Desa Sanggrahan Tahun 2018-2020?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui efektivitas siskeudes dalam manajemen keuangan di Desa Sanggrahan tahun 2018-2020.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan siskeudes di Desa Sanggrahan Tahun 2018-2020.

## **1.4.Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari di jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sehingga nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah pengetahuan serta bahan penelitian selanjutnya terkait pengayaan implementasi teori sistem informasi keuangan dalam manajemen

keuangan. Penulis berharap hasil karya ini dapat dijadikan sumbangsih pemikiran guna dijadikan pelajaran dalam bidang akademik.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, serta Pemerintah Desa Sanggrahan dalam melaksanakan siskeudes sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik. Serta pemerintah desa dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan dalam pelaksanaan manajemen keuangan desa menggunakan siskeudes.

### **1.5.Literatur Review**

Dalam penyusunan skripsi, mengkaji studi terdahulu menggunakan topik yang relevan dengan penelitian merupakan sebuah keharusan. Hal ini berguna untuk memberikan kejelasan pemahaman terhadap penyusun dan memberikan batasan atau fokus penelitian yang akan diteliti. Selain itu, mengkaji studi terdahulu dengan topik yang relevan juga akan berguna untuk memastikan orisinalitas bahwa penyusunan skripsi berjudul “Efektivitas Siskeudes Dalam Manajemen Keuangan Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Tahun 2018-2020” merupakan berbeda dan belum pernah dibahas ataupun diteliti sebelumnya.

Secara efektivitas implementasi siskeudes dinilai menjadi salah satu cara yang efektif dalam menghadapi perubahan kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Artini, Wahyuni, & Herawati, 2017). Perlu adanya pengendalian yang dilakukan oleh internal pemerintah,

karena hal tersebut memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Arfiansyah, Mufti Arief, 2020).

Mengingat bahwa kebijakan menyesuaikan dengan peraturan terbaru, sehingga pengelolaan keuangan juga harus mengikuti perubahan peraturan dan kebijakan yang telah ditentukan. Sehingga sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan siskeudes. Tidak hanya itu adanya sosialisasi dan manajemen kontrol memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa (Nintyari, Kurniawan, & Atma, 2019).

Selain dari manfaat siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan, peran dari sumber daya manusia (SDM) sangat berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan siskeudes serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan (Arianto & Kahpi, 2021). Kesiapan yang dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) akan mempengaruhi terhadap kemungkinan adanya kesalahan dalam input data (Maharlika, Karamoy & Pusung, 2018). Serta kemampuan teknologi informasi harus dimiliki oleh pegawai sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaan.

Pemerintah desa juga perlu adanya inisiatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan pelatihan serta pendampingan dalam pelaksanaan siskeudes. Pada akhirnya kemudahan sistem keuangan desa juga akan dirasakan oleh pegawai (Sulina, Wahyuni, & Kurniawan, 2017). Pelaksanaan monitoring juga dapat dilaksanakan secara langsung, karena pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes)

langsung terhubung dengan server di kabupaten dan pusat. Untuk itu sumber daya manusia (SDM) harus dipersiapkan secara baik agar implementasi dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan (Wilma & Hapsari, 2019)

Pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes) harus disesuaikan atau sinkronisasi dengan rencana pembangunan desa, agar perencanaan keuangan yang diinput sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa (Jamaluddin, Sumaryana, Rusli, & Buchari, 2018). Sistem keuangan desa (siskeudes) yang memiliki manfaat untuk mempermudah desa dalam pengelolaan keuangan serta mempermudah pemerintah daerah dan pusat dalam melakukan monitoring. Siskeudes memiliki menu-menu yang menyediakan format sesuai dengan kebutuhan dari mulai perencanaan hingga pengawasan yang dinilai berhasil (Sulina et al., 2017).

Akan tetapi dengan adanya perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap daerah itu akan mempengaruhi pelaksanaan. Pemerintah daerah perlu adanya komitmen dalam menerapkan siskeudes untuk pengelolaan keuangan. Sehingga sumber daya manusia (SDM) dapat menguasai dengan baik (Indrianti et al., 2007).

Tabel 1.1

Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
1	Luh Restiti Nityari, Putu Sukma Kurniawan, dan Dr.	2019	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, serta	Dalam penelitian ini sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh

	Anantawikrama Tungga Atmadja		Manajemen Kontrol Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Empiris Pada Desa-Desa Penerima Dana Desa di Kabupaten Tabanan)	terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan siskeudes. Tidak hanya itu, sosialisasi dan manajemen kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi siskeudes.
2	Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli, dan Rd. Ahmad Buchori	2018	Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa tidak memberikan dampak terhadap pembangunan desa. Apalagi pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana pembangunan daerah (RPJMD). Untuk itu perlu adanya sinkronisasi rencana pembangunan desa terhadap rencana pembangunan daerah serta pengelolaan keuangan desa.
3	Ni Made Dwi Artini, Made Ari Wahyuni, Nyoman Trisna Herawati	2017	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Konteks Disiplin Diri Pada Desa Tigawasa	Dalam penelitian ini disebutkan bahwa implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) sudah dilaksanakan secara baik. Siskeudes dinilai menjadi sebuah cara yang efektif dalam menghadapi perubahan kebijakan serta disiplin diri yaitu kesadaran dalam

				melaksanakan tanggungjawab.
4	Mufti Arief Arfiansyah	2020	Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem keuangan desa (siskeudes) memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa, serta sistem pengendalian internal pemerintah juga memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
5	A.Arianto dan Ashabul Kahpi	2021	Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa	Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaannya tidak dikelola oleh bagian keuangan, akan tetapi oleh bagian umum. Sehingga fungsi kaur keuangan tidak dilaksanakan. Akan tetapi sarana dan prasarana yang diperlukan sudah sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi siskeudes meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan karena lebih rinci dan mencegah adanya kesalahan pelaporan dan kecurangan pengelolaan dana desa di Desa Tompobulu.
6	Rahmi Hayati	2021	Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Muara	Penelitian ini menyebutkan bahwa aplikasi siskeudes berhasil dalam pengelolaan keuangan dari

			Harus Kabupaten Tabalong	perencanaan hingga pengawasan. Siskeudes juga mempermudah dan lebih efektif pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan sudah memiliki menu-menu yang menyediakan format sesuai dengan ketentuan yang ada.
7	Angela Ayu Wilma Arintyas Putri dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari	2019	Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar	Dalam penelitian ini diterangkan bahwa penggunaan aplikasi siskeudes sudah diimplementasikan dengan baik. Pelaksanaan pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes juga tidak memiliki kendala dengan sumber daya manusia (SDM) dikarenakan pegawai sudah terbuka dengan teknologi informasi. Penggunaan aplikasi siskeudes juga dapat sebagai sarana pengawasan pengelolaan dana desa secara tepat yang langsung terhubung dengan server kabupaten.
8	Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, dan Rudy J. Pusung	2018	Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan	Penelitian ini membahas mengenai siskeudes di Desa Suwaan yang dinilai sudah berjalan dengan baik. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti

			Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)	terjadinya <i>error</i> ada saat proses input data. Sehingga ada beberapa laporan keuangan yang belum terinput masih menggunakan laporan secara manual. Akan tetapi kesiapan dari segi sumber daya manusia (SDM) sudah terpenuhi. Adanya siskeudes menjadikan pekerjaan di Pemerintah Desa berupa pelaporan keuangan dinilai lebih efektif dan efisien.
9	Reny Indrianti, Murdiansyah Herman, dan Fika Fibriyanika	2020	Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron	Dalam penelitian ini, penerapan siskeudes dinilai belum efektif dan optimal dikarenakan sumber daya manusia (SDM) belum menguasai dengan baik. Serta perbedaan fitur bagi setiap daerah dan kurangnya komitmen serta peran pemerintah provinsi dalam melaksanakan penerapan siskeudes dalam pengelolaan keuangan.
10	Gusti Ayu Trisha Sulina, Made Arie Wahyuni, Putu Sukma Kurniawan	2017	Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)	Dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dinilai memberikan kemudahan bagi para pegawai. Meskipun sumber daya manusia di Desa Kaba-

				<p>kaba masih rendah, sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap penerapan siskeudes. Hal tersebut kemudian dijadikan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan Pendidikan serta pelatihan dan memberikan pendampingan dalam melaksanakan siskeudes. Adanya siskeudes dinilai membantu pegawai dikarenakan pekerjaan dapat dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan ketentuan. Ditambah lagi kesalahan pelaporan keuangan dapat diketahui secara langsung dengan siskeudes.</p>
--	--	--	--	---

Dari beberapa literatur penelitian sebelumnya kebanyakan membahas tentang implementasi, pengaruh dan akuntabilitas siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa melalui beberapa pendekatan, membahas tentang implementasi dan peran sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut yang membedakan dengan penelitian ini, karena dalam penelitian ini akan membahas tentang efektivitas dari siskeudes dalam manajemen keuangan desa, apakah siskeudes sudah berjalan dengan baik atau masih belum berjalan dengan optimal dalam masyarakat. Selain itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah wilayah

yang dijadikan sebagai lokasi penelitian yaitu di Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

## **1.6. Kajian Teori**

### **1.6.1 Efektivitas**

#### **1.6.1.1. Definisi Efektivitas**

Efektivitas menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dilakukan kemudian akan memberikan efek atau dampak terhadap hal lain. Menurut Gibson efektivitas yaitu sebuah keberhasilan tujuan serta sasaran yang telah disepakati bersama. Tingkat tujuan dan sasaran tersebut akan menunjukkan efektivitas. Tercapainya sebuah tujuan dan sasaran dapat dilihat dari sejauh mana pengorbanan yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas adalah keterkaitan antara hasil dengan sasaran, semakin tinggi kontribusi hasil atas sasaran, sehingga akan lebih efisien suatu lembaga, kegiatan, maupun rencana tersebut (Mahmudi, 2005).

Sondang P. Siagian mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan pemanfaatan sarana prasarana, serta sumber daya dengan jumlah yang ditentukan sebelumnya, yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah barang berdasarkan jasa kegiatan yang dilaksanakan. Efektivitas akan menunjukkan sejauh mana kesuksesan yang dilihat dari aspek tercapai tidaknya sasaran yang sudah ditentukan. Semakin program mendekati sasaran, akan semakin tinggi pula tingkat efektivitas yang diperoleh (Saigon, 2002).

Menurut Harbani Pasolong, efektivitas berasal dari kata “efek”. Kata ini sering terjadi karena hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang

sebagai sebab dari variabel lain. Efektivitas menandakan jika tujuan yang direncanakan sudah berhasil dan mencapai target yang ditentukan (Paslong, 2007). Efektivitas adalah sebuah pola dari hubungan yang memiliki output serta tujuan, semakin besar pengaruh output terhadap capaian tujuan maka semakin efektif suatu organisasi, kegiatan dan program tersebut (Mahmudi, 2005).

Sehingga dari pengertian efektivitas diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan penilaian atas segala sesuatu yang memiliki orientasi tujuan, semakin mencapai tujuan yang telah ditentukan maka semakin efektif program. Efektivitas tersebut dinilai dari tahapan-tahapan yang telah dilewati dan juga pengaruh dari internal dan eksternal dalam proses pelaksanaan program.

#### 1.6.1.2.Ukuran Efektivitas

Ukuran efektivitas dapat dilihat dari hasil dari implementasi yang telah dilakukan. Dapat dikatakan efektif apabila hasil yang didapatkan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dapat dikatakan tidak efektif apabila hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan target atau sasaran yang telah diputuskan.

Menurut Campbell J.P. (1970) ukuran sebuah efektivitas secara umum ada beberapa indikator antara lain, yaitu:

- a. Keberhasilan sistem

Keberhasilan kebijakan merupakan seberapa tinggi tingkat keberhasilan yang sesuai dengan target capaian sistem yang sudah direncanakan sebelumnya. Kendala dalam pelaksanaan program atau kebijakan dapat dilihat dari identifikasi dari sini.

b. Keberhasilan sasaran

Keberhasilan sasaran dapat dilihat dari sasaran yang ditentukan, apakah dalam pelaksanaannya sudah tepat atau sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari pengguna program atau kebijakan.

c. Kepuasan terhadap sistem

Ukuran dari kepuasan terhadap program dapat diketahui dari tingkat kepuasan pengguna atau pelaku implementasi. Sehingga dapat diketahui harapan kedepannya terhadap program.

d. Tingkat input dan output

Tingkat input dan output memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas. Dikarenakan efektivitas merupakan sebuah proses dari input, proses, hingga output dari sebuah program.

e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan keseluruhan target dan sasaran yang digunakan untuk menilai capaian kepuasan pihak yang telah melaksanakan program. Dengan hal ini dapat diketahui hambatan apa saja yang terjadi selama pelaksanaan.

Menurut Hari Lubis dan Martani Huseini (1987), dalam mengukur efektivitas sebuah organisasi terdapat tiga pendekatan yaitu:

1) Pendekatan Sumber

Ukuran efektivitas menurut pendekatan ini adalah melalui input. Dalam pendekatan ini lebih mengutamakan dalam memperoleh sumber daya fisik dan non fisik yang dibutuhkan. Keterbukaan sistem sebuah lembaga terhadap lingkungan juga dilakukan untuk memperoleh sumber input yang nantinya outputnya akan dirasakan oleh lingkungan itu kembali.

2) Pendekatan Proses

Pendekatan ini untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program yang sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Ukuran efektivitas dinilai dari efisiensi baik dari segi waktu dan biaya, prosedur pelayanan, koordinasi, responsivitas pegawai dan sarana prasarana.

3) Pendekatan Sasaran

Ukuran efektivitas atau keberhasilan organisasi terletak pada output yang sesuai dengan target dan rencana yang telah ditentukan. Sehingga dalam pelaksanaannya harus mencapai dan merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Ukuran efektivitas tidak hanya soal hasil atau output, akan tetapi juga mulai dari input, proses, hingga output. Efektivitas juga perlu adanya keseimbangan dan kerjasama dari sebuah organisasi untuk mencapai

sebuah tujuan atau sasaran. Dapat juga dikatakan efektivitas organisasi mencakup aspek intern dan ekstern yang berupa kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sekitar

#### 1.6.1.3.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Pendapat yang dikemukakan oleh Hasibuan (2014) bahwa ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas program, seperti:

- 1) Kompetensi administrator, yaitu softskill yang dimiliki untuk menunjang dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Kualitas aparatur, yaitu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki baik dari tingkat pengetahuan, kemampuan, serta kemauan.
- 3) Pengawasan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan ketentuan guna mencapai tujuan secara baik.

Faktor lain yang berguna untuk menjamin suatu keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas dalam sebuah organisasi, perlu adanya pengaruh dari intern organisasi yang menimbulkan kuantitas kerja, kualitas kerja, pemanfaatan waktu dan peningkatan sumber daya manusia (Hasibuan, 2014). Pendapat lain yang dikemukakan oleh Tangkilisan dalam (Atmaja et al., 2018) bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi sebuah efektivitas. Pertama, faktor internal yang dapat diketahui dengan adanya kerja sama baik antar individu, individu dengan instansi yang berguna untuk mempercepat pencapaian tujuan. Kedua,

faktor eksternal yang dapat berupa berbagi dengan lembaga atau instansi lain guna mengatasi hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan.

### **1.6.2. Manajemen Keuangan Desa**

Pengelolaan atau biasa disebut sebagai manajemen adalah sebuah proses yang diterapkan baik oleh individu atau kelompok untuk mempermudah dalam koordinasi atau pengaturan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Menurut Sumarsono dalam (Fahri, 2017) manajemen keuangan desa terdiri atas:

#### 1) Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini dimulai dengan pemilihan serta penetapan tujuan bersama. Dalam proses penetapan tujuan harus melalui perumusan bersama hingga penetapan keputusan.

#### 2) Pengorganisasian

Pada tahap pengorganisasian ini ditentukan bagaimana struktur organisasi atau kepengurusan. Serta pembentukan uraian tugas masing-masing yang harus dikerjakan. Sehingga nantinya dapat membagi tugas demi mencapai tujuan bersama. Pengorganisasian ini juga mempermudah dalam melaksanakan koordinasi.

#### 3) Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan pembagian tugas sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Kemudian pelaksanaan kegiatan

harus berkoordinasi dengan pihak terkait agar target atau tujuan dapat tercapai.

#### 4) Penganggaran

Tahap ini berisikan tata cara pelaksanaan keuangan. Sehingga anggarannya nanti dapat digunakan secara efektif dan efisien.

#### 5) Pengawasan

Pada tahap pengawasan ini nantinya dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran baik melalui pengawasan internal maupun pengawasan eksternal.

Sedangkan menurut Wiratna (2017) pada tahap perencanaan, pemerintah desa melakukan penyusunan pembangunan desa yang mengacu terhadap perencanaan pembangunan daerah. Serta Lapanda juga berpendapat bahwa penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Setelah itu dijelaskan oleh Herlianto bahwa pengawasan dan evaluasi memiliki peran penting untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan program yang sudah direncanakan (Fitria, 2013)

Manajemen keuangan desa bertujuan untuk mengatur dan mengelola yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan. Manajemen atau pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan dan evaluasi (Rivan, Arif & Maksun, 2019). Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, penggunaan sistem keuangan desa (siskeudes) digunakan untuk mempermudah

pengelolaan keuangan desa, serta didalamnya terdapat menu format yang dibutuhkan mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan desa yang minim kesalahan.

### 1.6.3. Sistem Informasi

Sistem informasi menurut (Machmud, 2013) adalah sebuah rangkaian yang terdiri atas lebih dari satu subsistem yang saling berkaitan untuk menjalankan tujuan yang sama. Sistem informasi mencakup sebuah kegiatan yang terdiri atas pengumpulan, pengorganisasian dan pendistribusian data yang berguna dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan menurut (Puspitasari & Budiman, 2021) sistem informasi merupakan sebuah metode yang menghasilkan informasi secara tepat yang berguna dalam kegiatan pengambilan keputusan organisasi serta berguna untuk meningkatkan perencanaan hingga pengawasan.

Sistem informasi keuangan menurut (Abdullah & Samad, 2019) adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data kemudian menghasilkan informasi ataupun laporan yang berguna dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi dari sistem informasi akuntansi menurut Romney (2014), antara lain, yaitu:

- a. Memberikan sistem informasi akuntansi yang tepat waktu
- b. Memberikan sistem informasi akuntansi yang relevan
- c. Memberikan sistem informasi akuntansi yang dapat dipercaya

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Satriajaya, Handajani, & Putra (2017) bahwa, sistem informasi pengelolaan keuangan yang dirancang dengan baik dan tepat akan berpengaruh terhadap manajemen sumber daya yang lebih efektif dan efisien serta keberhasilan dari sebuah sistem yang dijalankan akan bergantung pada kapasitas individu yang menjalankan.

### **1.7. Definisi Konseptual**

#### **1.7.1. Efektivitas Sistem Keuangan Desa**

Efektivitas adalah sebuah rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan berbagai macam alatnya seperti sumber daya serta saran dan prasarana dapat berjalan dengan semestinya. Semakin efektif sebuah program ketika program tersebut semakin mendekati sasaran, dan sebaliknya ketika program tersebut semakin jauh dari sasaran yang sudah direncanakan maka program tersebut tidak efektif. Efektivitas sistem keuangan desa merupakan sebuah alat yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari kualitas laporan.

#### **1.7.2. Manajemen Keuangan Desa**

Manajemen keuangan merupakan aktivitas yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap keuangan agar hasil yang didapatkan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan bersama. Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan desa merupakan segala bentuk cara mengatur

keuangan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

### 1.7.3. Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan rangkaian subsistem yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Metode yang digunakan dalam sebuah sistem juga mempengaruhi hasil yang akan diperoleh seperti pengorganisasian, pencatatan, dan pengawasan terhadap manajemen yang lebih efektif dan efisien.

### 1.8. Definisi Operasional

Tabel 1.2

Tabel Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1	Efektivitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	Keberhasilan Sistem	1. Pelaksanaan secara keseluruhan dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban laporan
		Keberhasilan Sasaran	1. Ketepatan hasil laporan siskeudes
		Kepuasan Terhadap Program	1. Tingkat kepuasan dari organisasi terhadap siskeudes 2. Harapan kedepan siskeudes
		Tingkat Input	1. Identifikasi tingkat input yang berupa perencanaan dan pelaksanaan manajemen keuangan melalui siskeudes
		Tingkat Output	1. Identifikasi tingkat output siskeudes berupa pengawasan dan evaluasi laporan
		Pencapaian Tujuan Menyeluruh	1. Tercapainya tujuan pelaksanaan siskeudes dalam manajemen keuangan desa

		Persepsi Pengguna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui persepsi organisasi desa dalam menggunakan siskeudes</li> <li>2. Pengawasan penggunaan siskeudes</li> </ol>
		Dampak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui dampak yang terjadi setelah penggunaan siskeudes terhadap manajemen keuangan desa</li> </ol>
2	Faktor yang mempengaruhi	Kualitas Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia serta kerjasama yang telah dilakukan selama pelaksanaan siskeudes</li> </ol>
		Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui faktor sarana prasarana dan koordinasi</li> </ol>
		Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui faktor kerjasama, koordinasi, pelatihan</li> </ol>

## 1.9. Metode Penelitian

### 1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat *naturalistic* dikarenakan berdasarkan terhadap kondisi alamiah dan data yang didapatkan secara *interpretive* (Sugiyono, 2019). Sedangkan untuk memberikan penjelasan maka dilakukan dengan Deskriptif sehingga data dijabarkan sesuai dengan interpretasi (Raco, 2010). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis dari berbagai studi kepustakaan yang terdapat secara *hardfile* seperti buku, majalah, koran dan *softfile* seperti halnya jurnal, Artikel, Berita *online* dan lain sebagainya (Agusta, 2014). Penelitian jenis ini menggunakan metode yang digambarkan secara sistematis sesuai dengan keadaan serta

kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini sesuai dengan variabel-variabel yang telah ditentukan, sehingga dapat kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

### **1.9.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, dimana Desa Sanggrahan merupakan salah satu desa yang sudah menerapkan siskeudes. Sehingga saya memilih lokasi penelitian ini di Desa Sanggrahan karena data pembangunan desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung merupakan salah satu desa yang maju.

### **1.9.3. Unit Analisa Data**

Unit Analisis merupakan objek yang dijadikan sebagai penelitian atau pusat perhatian dalam penelitian. Unit Analisa menjadi informan yang memiliki kompetensi dalam bidang yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah petugas Kaur Pembangunan Desa Sanggrahan dan petugas Kasi Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

### **1.9.4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dilakukan oleh orang yang melakukan penelitian dan data tersebut merupakan data terbaru. Data primer juga dapat disebut sebagai data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian yang dapat dipercaya. Subjek tersebut merupakan orang yang berkenan memberikan informasi sesuai dengan variabel yang telah ditentukan oleh peneliti atau data yang diperoleh secara langsung dari responden secara langsung. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data.

Tabel 1.3

Sumber Data Primer

No	Nama Data	Data yang dibutuhkan	Informan	Teknik Pengumpulan Data
1	Keberhasilan Program	Keseluruhan proses pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban laporan	Bidang Pembangunan Desa Dispermades Kabupaten Temanggung, Kaur Keuangan Desa Sanggrahan	Wawancara
2	Keberhasilan Sasaran	Ketepatan hasil laporan siskeudes	Kaur Keuangan Desa Sanggrahan	Wawancara
3	Kepuasan Terhadap Program	Kepuasan dan harapan desa terhadap siskeudes dalam manajemen keuangan	Kaur Keuangan Desa Sanggrahan	Wawancara
4	Tingkat Input	Tingkat input berupa perencanaan dan pelaksanaan manajemen keuangan melalui siskeudes	Kaur Keuangan Desa Sanggrahan, Masyarakat Desa Sanggrahan	Wawancara

5	Tingkat Output	Tingkat output siskeudes berupa pengawasan dan evaluasi laporan	Kaur Keuangan Desa Sanggrahan	Wawancara
6	Pencapaian Tujuan	Pencapaian tujuan dari penerapan siskeudes	Bidang Pembangunan Desa Dispermades Kabupaten Temanggung, Kaur Keuangan dan Perencanaan Desa Sanggrahan	Wawancara
7	Persepsi	Untuk mengetahui persepsi dari organisasi desa dalam menggunakan siskeudes	Kaur Keuangan Desa Sanggrahan, Masyarakat Desa Sanggrahan	Wawancara
8	Dampak	Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan siskeudes	Bidang Pembangunan Desa Dispermades Kabupaten Temanggung, Kaur Keuangan Desa Sanggrahan, dan Masyarakat Desa Sanggrahan	Wawancara
9	Faktor pendorong dan penghambat	faktor internal dan eksternal yang berpengaruh dalam manajemen keuangan desa menggunakan siskeudes	Bidang Pembangunan Desa Dispermades Kabupaten Temanggung, Kaur Keuangan Desa Sanggrahan	Wawancara

## 2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang data primer. Data sekunder diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada seperti buku, ajalah, dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan ataupun laporan peneliti terdahulu. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak

dapat memberikan data secara langsung kepada peneliti, akan tetapi harus melalui orang lain dalam bentuk dokumen (Sugiyono, 2009).

Tabel 1.4  
Sumber Data Sekunder

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Arsip realisasi dan dokumentasi pelaksanaan siskeudes Desa Sanggrahan	Desa Sanggrahan	Dokumentasi
2	Artikel, Jurnal, Berita terkait dengan siskeudes	Pihak Ketiga	Dokumentasi

#### 1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada narasumber atau responden kemudian jawaban dapat dicatat ataupun direkam. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada Kasi Keuangan dan Pembangunan Desa Sanggrahan serta Bidang Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung yang menggunakan teknik interview.

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang disesuaikan dengan subjek penelitian. Dokumentasi dapat berupa catatan harian, surat, artikel, surat kabar, foto, brosur, buku, serta laporan yang berkaitan dengan efektivitas penerapan

siskeudes terhadap pembangunan desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung tahun 2018-2020, sehingga dapat dijadikan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### 1.9.6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, yaitu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan serta menganalisa data sehingga dapat memberikan informasi dan pemahaman terkait permasalahan secara rinci dan sistematis. Kemudian setelah data didapatkan digambarkan menggunakan kata-kata ataupun kalimat sehingga didapatkan dapat ditarik kesimpulan, baik data yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi. Selanjutnya data tersebut akan dikaitkan dengan teori yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun tahap-tahap menganalisis data dapat dirincikan sebagai berikut:

##### 1) Reduksi Data

Dalam tahap ini peneliti berfokus dalam menentukan hal-hal yang pokok dan penting dalam penelitian. Setelah itu melakukan analisis yang menajam, menggolongkan, serta mengarahkan penelitian sesuai dengan indikator yang telah ditentukan sebelumnya.

##### 2) Penyajian Data

Pada tahapan penyajian data, data yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian disusun dan dikelompokkan. Setelah itu data tersebut diolah menjadi sebuah laporan yang tersusun secara sistematis

dan terinci agar dapat menggambarkan serta mendeskripsikan sesuai dengan kondisi yang ada agar lebih mudah untuk dipahami.

### 3) Pengambilan atau penarikan kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan diharapkan agar temuan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Proses penarikan kesimpulan merupakan sebuah proses analisis yang menghubungkan informasi-informasi terperinci kemudian dijadikan sebuah kesimpulan yang berfokus pada pokok permasalahan penelitian.